

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Perkembangan suatu bangsa khususnya pembangunan ekonomi sebagai titik beratnya harus mengacu pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Pembangunan bangsa yang menuju perekonomian yang mapan tidak dapat dipisahkan dari pembangunan perekonomian yang didukung oleh adanya kegiatan investasi untuk keperluan pembangunan itu sendiri dan dibutuhkan berbagai sarana dan prasarana yang hanya dapat tercipta melalui proses-proses transformasi berbagai sumberdaya, modal lahan, tenaga kerja serta perangkat peraturan yang mendukung.

Kegiatan investasi merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk menciptakan sarana dan prasarana dalam pembangunan sehingga pemerintah selalu berusaha menarik pengusaha asing guna menanamkan modalnya agar ikut mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui kegiatan investasi. Kegiatan investasi tersebut, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah (BUMN), koperasi maupun swasta akan memberi berbagai keuntungan, seperti memberikan lapangan kerja, pemanfaatan sumber daya manusia dan sebagainya. Menyadari bahwa pembangunan nasional membutuhkan pembiayaan yang sangat besar dan agar tercapainya sarana yang telah ditetapkan harus dibarengi dengan kerja keras untuk memperoleh sumber

pembiayaan pembangunan, baik itu pembiayaan yang bersumber dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

Selama beberapa tahun terakhir apabila ditinjau secara menyeluruh ternyata iklim investasi dipengaruhi oleh beberapa variabel, ekonomi, sosial, budaya, dan sosial politik. Semua variabel tersebut akan membentuk suatu iklim yang akan menjadi acuan bagi investasi yang paling menguntungkan untuk berproduksi dalam rangka mengantisipasi globalisasi perekonomian dunia, yang terbentuknya internasionalisasi produksi.

Globalisasi telah mengubah secara drastis pola produksi dari perusahaan dalam maupun asing yang semua berupaya untuk memproduksi semua kebutuhan menjadi spesialisasi produksi yaitu hanya memproduksi bagian-bagian tertentu saja, dan bagian-bagian lainnya diproduksi oleh perusahaan-perusahaan yang bertindak sebagai supplier. Lokasi tempat berproduksi tidak lagi ditentukan oleh batas-batas negara, akan tetapi disesuaikan lokasi yang dapat memberikan keuntungan yang optimal atau dengan perkataan lain yang memiliki keuntungan kompetitif. Hal tersebut juga berlaku dalam Investasi asing, yang dalam beberapa tahun terakhir, setelah munculnya krisis multidimensi berkepanjangan, Indonesia belum juga “berjaya” menarik investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia sekaligus mengembalikan iklim investasi yang kondusif seperti halnya saat sebelum terjadinya krisis.

B. Tujuan Penulisan

Penulisan skripsi ini bertujuan :

- a. Untuk mengetahui peran dari Departemen Luar Negeri Indonesia dalam mempromosikan penanaman modal asing di Indonesia.
- b. Untuk menjawab rumusan masalah dan membuktikan hipotesa yang ada.

C. Latar Belakang Masalah

Investasi merupakan suatu faktor yang krusial bagi kelangsungan proses pembangunan ekonomi, atau pertumbuhan ekonomi jangka panjang suatu negara. Pembangunan ekonomi melibatkan kegiatan-kegiatan produksi (barang dan jasa) di semua sektor ekonomi. Untuk keperluan kegiatan-kegiatan tersebut perlu dibangun pabrik-pabrik, gedung-gedung perkantoran, mesin-mesin dan alat-alat produksi, infrastruktur, alat-alat transportasi dan komunikasi, dan sebagainya. Untuk pengadaan semua itu diperlukan dana untuk membiayainya yang disebut dana investasi,¹ baik itu PMA (Penanaman Modal Asing) maupun (Penanaman Modal Dalam Negeri) PMDN.

Seperti negara-negara lain di Asia Tenggara, Indonesia sejak pembangunan ekonomi dimulai semakin tergantung pada sumber sumber luar negeri untuk membiayai investasi di dalam negeri. Sebenarnya untuk pembiayaan investasi di dalam negeri pemerintah Indonesia jauh sebelum terjadinya krisis telah berusaha mengurangi ketergantungan terhadap modal

¹ Tulus T.H. Tambunan, Dr. *Transformasi Ekonomi di Indonesia, Teori dan Penemuan*, Empiris Jakarta, Salemba Empat 2001, hal 40

asing dalam bentuk hutang dan menggantikannya dengan investasi, khususnya PMA. Dan memang hasil usaha pemerintah sudah kelihatan sejak pertengahan tahun 1980-an hingga muncul krisis. PMA sebagai salah satu sumber dana investasi menunjukkan suatu peningkatan yang pesat.

Akan tetapi, investasi juga merupakan variabel yang mudah goncang dan sangat tidak stabil, hal ini sangat berpengaruh pada pendapatan nasional. Sehingga besar kecilnya penanaman modal asing akan sangat berpengaruh pada besar kecilnya pendapatan nasional, sedangkan diketahui untuk melanjutkan pembangunan bangsa ini sangat membutuhkan biaya yang tidak sedikit, dan salah satunya didapat dari pendapatan nasional yang memadai.

Terlebih lagi sejak bulan Juli 1997 terjadi krisis moneter yang bermula ketika Thailand mengalami penurunan nilai mata uang secara drastis yang menjadi krisis keuangan dan perbankan. Krisis yang terjadi di Thailand kemudian menjalar ke negara-negara di Asia Tenggara dan meluas ke Asia seperti di Malaysia, Philipina, Hongkong, Korea Selatan dan juga Jepang, yang mengakibatkan resesi berkepanjangan di negara Indonesia karena keadaan perekonomian Indonesia jauh lebih buruk dibandingkan dengan negara-negara lainnya, disebabkan oleh faktor lemahnya struktur perekonomian nasional, tingginya hutang luar negeri baik hutang pemerintah maupun hutang swasta. Lemahnya sistem finansial dan tidak konsistennya perilaku pemerintah dalam melaksanakan reformasi ekonomi dan dalam setiap

pengambilan kebijakan. Fakta ini menurunkan kepercayaan Indonesia di mata Internasional dan memerlukan waktu yang lama untuk memperbaikinya.²

Krisis moneter yang melanda bangsa ini berdampak pada gejolak moneter mengakibatkan turunnya nilai mata uang rupiah terhadap dollar AS, sehingga berpengaruh besar terhadap kepercayaan masyarakat dalam negeri maupun dunia Internasional. Terlebih dengan adanya kerusuhan yang terjadi di berbagai kota di Indonesia dalam tingkat yang mengkhawatirkan.

Kondisi bangsa yang semakin terpuruk dan disertai dengan berbagai tuntutan reformasi dan rakyat yang menganggap pemerintah tidak mampu membawa bangsa Indonesia pada keadaan yang diharapkan. Setelah mengalami masa transisi yang cukup panjang, dan telah mengalami beberapa kali pergantian pemerintahan, mulai dari pemerintahan Orde Lama yang dipimpin oleh Soekarno, kemudian digantikan oleh pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto selama 32 tahun dan digantikan oleh B.J.Habibie (yang pada saat itu menjabat sebagai wakil presiden) pada bulan Mei 1998, kemudian pada pertengahan tahun 1999 tepatnya bulan Juni 1999 melalui Pemilihan Umum, terpilihlah K.H.Abdurrahman Wahid sebagai presiden Indonesia yang ke-IV. Masa pemerintahan Gus Dur hanya berlangsung selama sekitar 2 tahun, pada bulan Juli 2001, melalui Sidang Istimewa MPR, Gus Dur diturunkan dan diganti oleh Megawati yang sebelumnya menjadi Wakil Presiden. Lalu pada tahun 2004 diadakanlah Pemilu yang dianggap paling

² *Transformasi Ekonomi, Op. Cit* , hal 21

demokratis sepanjang sejarah perpolitikan Indonesia, di mana pada Pemilu tersebut selain melaksanakan Pemilu legislatif, rakyat Indonesia juga untuk pertama kalinya memilih secara langsung presidennya sendiri yang akhirnya menetapkan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Jusuf Kalla sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia periode 2004-2009.

Berkaitan dengan semuanya, keadaan Indonesia terus menerus mengalami gejolak sosial, politik, dan keamanan. Ketidakpercayaan masyarakat Indonesia pada pemerintah yang berkuasa merupakan bom waktu yang bisa mengakibatkan semua rencana pembangunan yang telah dijalankan menjadi hancur.

Keguncangan politik dalam negeri telah menyebabkan banyak investor asing hengkang, dan banyak yang membatalkan rencana penanaman modalnya ke Indonesia. Misalnya, Jepang sebagai peringkat pertama PMA, pada tahun 1998 hanya menanamkan modalnya sebesar US \$ 2,187 juta. Angka ini mengalami penurunan 34% dan tahun sebelumnya. Hal serupa juga terjadi pada investor dan negara lainnya seperti, Singapura, Amerika Serikat, Inggris, Korea dan Hongkong. Para investor tidak ingin mengambil resiko, setelah apa yang dialami Indonesia.

Kondisi ini, menjadi penghalang besar bagi pemerintahan yang sedang berkuasa saat itu. Gejolak sosial, politik, dan keamanan sangatlah berpengaruh pada masalah perekonomian. Dan di dalam formulasi untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi, kuncinya adalah kepercayaan para investor.

Salah satu harapan terbesar bagi penyelesaian permasalahan tersebut ditumpahkan pada masuknya Investasi Asing, terutama yang bersifat langsung (*Foreign Direct Investment / FDI*) yaitu investasi dengan jalan membangun perusahaan baru atau mengakuisisi perusahaan untuk menstimulasi ekonomi walaupun tidak menutup kemungkinan bagi Investasi Asing tidak langsung.

Dalam perkembangannya investasi asing di Indonesia merupakan variabel yang tidak tetap dan terus mengalami perubahan setiap waktu, sesuai dengan kondisi yang berlaku serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Berikut ini perkembangan investasi asing di Indonesia:

Tabel 1.1
Penanaman Modal Asing di Indonesia Sebelum Terjadinya Krisis
Periode 1993-1996 (dalam Milyar rupiah)

Tahun	1993	1994	1995	1996
Jumlah PMA	39.45	53.289	69.853	100.715

Sumber BKPM

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa investasi asing di Indonesia sempat mengalami kemajuan sangat pesat pada awal periode sampai pertengahan 1990-an. Hal ini berarti meluasnya lapangan pekerjaan, yang tentu berdampak positif terhadap kemajuan perekonomian bangsa dan peningkatan kesejahteraan rakyatnya. Indonesia bahkan sempat mendapat pujian luar biasa dari IMF karena berhasil menjadi negara primadona investasi di kawasan Asia.

Namun kemajuan perekonomian, khususnya peningkatan investasi di Indonesia yang sangat pesat tersebut tidak berlangsung lama. Indonesia dilanda krisis ekonomi yang kemudian menjadi krisis berkepanjangan yang berdampak buruk terhadap perekonomian Indonesia secara keseluruhan, termasuk investasi di Indonesia. Para investor yang sebelumnya banyak menanamkan modalnya di Indonesia, seolah enggan untuk melirik Indonesia, yang kondisinya saat itu penuh dengan konflik dan tidak stabil. Mereka lebih memilih negara-negara lain yang dianggap lebih tepat sebagai tempat berinvestasi, atau dengan kata lain para investor memilih melarikan modalnya ke tempat lain.

Tabel 1.2

**Penanaman Modal Asing di Indonesia Setelah Terjadinya Krisis
Periode 1997-2002 (dalam Milyar rupiah)**

Tahun	1997	1998	1999	2000	2001	2002
PMA	42.952	60.749.3	54.050	92.327.7	90.703	58.652

Sumber: BKPM

Dari data statistik di atas menyatakan bahwa krisis ekonomi yang dialami Indonesia pada pertengahan 1997 berdampak langsung terhadap penurunan jumlah PMA di Indonesia. Tetapi dalam perkembangannya beberapa tahun terakhir, walaupun banyak modal yang dilarikan ke luar tetapi jumlah PMA beberapa tahun belakangan (1999-2001) sempat mengalami peningkatan, meski pada tahun 2002 kembali mengalami penurunan.

Menyadari sulitnya menggaet investor asing, pemerintah Indonesia sesungguhnya tak tinggal diam. Untuk tahun 2003, telah dicananangkan pemerintah sebagai Tahun Investasi Indonesia, yang bertujuan untuk mengembalikan kepercayaan investor untuk melakukan kegiatan-kegiatan investasi di Indonesia melalui peran aktif seluruh masyarakat dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif, dengan membenahi berbagai hal yang menghambat kegiatan investasi di Indonesia. Namun program tersebut dianggap belum optimal, khususnya pada tahun pencanangannya. Sepanjang tahun 2003, berkaitan dengan tahun investasi mungkin yang bisa menjadi catatan penting adalah penandatanganan kerja sama BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) dengan seluruh pemerintah daerah tingkat provinsi, dan juga terbitnya Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2003 tentang Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi. Oleh karena itu, sebagai upaya mendongkrak investasi, maka tahun investasi yang semula dilangsungkan selama satu tahun akan diperpanjang hingga 2005.

Dalam hal ini, Departemen Luar Negeri Indonesia (Deplu) sebagai salah satu instansi pemerintah, diharapkan mampu menjalankan perannya dalam meningkatkan penanaman modal asing ke Indonesia guna tercapainya pemulihan kondisi perekonomian di Indonesia yang belakangan kurang kondusif.

Deplu sendiri dalam periode sebelumnya, bukannya tidak berperan dalam peningkatan investasi asing ke Indonesia. Deplu melalui KBRI-KBRI yang tersebar di berbagai negara di dunia juga telah melakukan kegiatan – kegiatan untuk mempromosikan penanaman modal asing ke Indonesia, seperti mengadakan kunjungan ke perusahaan – perusahaan akreditasi di luar negeri serta mengupayakan kunjungan misi dagang ke Indonesia, namun dengan dicanangkannya Tahun Investasi Indonesia pada tahun 2003, Deplu diharapkan menjadi salah satu pemain kunci dan berperan besar dalam pemulihan perekonomian Indonesia dari luar negeri khususnya dalam menarik minat investor asing untuk berinvestasi di Indonesia. Apalagi dalam Repeta tahun 2003 telah ditetapkan bahwa salah satu program utama Deplu adalah: “Peningkatan kerjasama Ekonomi Internasional, dengan tujuan mencari peluang dan potensi di luar negeri dan meningkatkan dukungan masyarakat luar negeri dalam pemulihan ekonomi, dengan sasaran terwujudnya peningkatan dukungan dunia internasional kepada Indonesia dalam rangka pemulihan dan perbaikan perekonomian nasional serta dalam upaya peningkatan kesejahteraan rakyat”³, sehingga diharapkan Deplu berperan lebih besar dalam mempromosikan penanaman modal asing ke Indonesia untuk menarik investor asing ke Indonesia.

³ <http://www.deplu.go.id/ind/REPETA.Deplu/htm>

D. Rumusan Masalah

Apa Peran Departemen Luar Negeri Indonesia Mempromosikan Penanaman Modal Asing di Indonesia selama periode 2003 -2005 ?

E. Kerangka Dasar Pemikiran

Teori adalah suatu pandangan atau persepsi tentang apa yang terjadi. Teori dalam hal ini digunakan sebagai kerangka dasar analisa dalam menjetaskan suatu fenomena itu terjadi dan mungkin juga meramalkan kejadian itu di masa datang.⁴

Untuk itu guna menjelaskan pokok permasalahan dalam penulisan ini maka penulis mengacu pada **Teori “Modernisasi”** dalam hal ini teori yang dikemukakan oleh Harrod dan Domar, yaitu : **Tabungan dan Investasi**. Evsey Domar dan Roy Harrod, kedua ahli ekonomi ini, mencapai suatu kesepakatan bahwa:”. . Pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh tingginya tabungan dan investasi. Jika tabungan dan investasi rendah, pertumbuhan ekonomi masyarakat atau negara tersebut juga akan rendah.”⁵

Rumus ini didasarkan pada asumsi bahwa masalah pembangunan pada dasarnya merupakan masalah menambahkan investasi modal. masalah keterbelakangan adalah masalah kekurangan modal. Kalau ada modal, dan modal itu diinvestasikan, hasilnya adalah pembangunan ekonomi.

⁴ Mochtar Mas'ood, *Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi*, LP3ES, Jakarta 1990, hal 49

⁵ Arief Budiman, Dr, *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*, PT Gramedia Pustaka Utam, Jakarta 2000, hal 19

Modal merupakan salah satu prasyarat pertumbuhan ekonomi negara-negara sedang berkembang, termasuk Indonesia biasanya memiliki problem besar berkenaan dengan kelangkaan modal pembangunan. Artinya jika Indonesia ingin meraih kembali pertumbuhan ekonominya, harus berupaya menarik modal asing.⁶

Kondisi Indonesia yang semakin terpuruk akibat merebaknya tindak kekerasan (kerusuhan) di berbagai kota di Indonesia, membawa dampak yang besar bagi aspek pembangunan, terutama perekonomian, di samping akibat krisis ekonomi. Hal ini menyebabkan lambannya proses pemulihan ekonomi dan masuknya kembali investasi asing ke Indonesia.

Tidak dapat dipungkiri bahwa penyebab utama krisis ekonomi yang dialami Indonesia adalah karena buruknya fundamental ekonomi Indonesia. Sedangkan lambatnya proses pemulihan ekonomi nasional selama dua tahun belakangan ini lebih disebabkan oleh kondisi politik, sosial, dan keamanan di dalam negeri yang kenyataannya sejak reformasi dicetuskan Mei 1998 lalu hingga saat ini semakin buruk.

Pemulihan ekonomi Indonesia berjalan lambat dikarenakan proses perbaikan fundamental ekonomi nasional tidak disertai kestabilan politik dan keamanan yang memadai, penyelesaian konflik sosial, serta kepastian hukum. Faktor-faktor non ekonomi ini merupakan aspek-aspek penting di dalam menentukan tingkat resiko yang terdapat dalam suatu negara yang menjadi

⁶ *Otonomi Daerah Op. Cit*, hal 77

dasar keputusan bagi para pelaku bisnis, khususnya asing, untuk melakukan usaha di negara tersebut.

Sebab utama dari keengganan para investor asing dalam melakukan investasi adalah masalah jaminan keamanan. Kondisi keamanan dalam negeri yang tidak pasti membuat para investor tidak berani untuk mengambil resiko yang tinggi. Selain itu, tuntutan-tuntutan reformasi lainnya, yang antara lain seperti : pemberantasan KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme), terutama masalah korupsi , serta masalah tidak adanya kepastian hukum, ditambah lagi dengan kurangnya promosi yang dilakukan pemerintah Indonesia di bidang investasi, yang tentu membuat keadaan semakin tidak menguntungkan.

Banyaknya kejadian yang menimpa Indonesia mengakibatkan banyaknya investor asing yang melarikan modalnya ke luar. Sehingga dapat dilihat pada awal masa krisis tahun 1997 jumlah PMA sangat menurun tajam. Dan pada tahun-tahun berikutnya dilakukan berbagai upaya untuk mengembalikan modal tersebut ke Indonesia.

Akan tetapi, peningkatan jumlah modal yang masuk belum dapat menyeimbangkan kondisi pembangunan, dengan kata lain bahwa peningkatan investasi tidak disertai dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi dan Indonesia belum dapat keluar dari krisis. Hal ini disebabkan oleh, jumlah proyek-proyek PMA yang ada merupakan penjumlahan dan proyek-proyek baru dan perluasan. Di mana proyek perluasan adalah proyek lama yang hutangnya dialihkan menjadi saham oleh pemberi modal. Dan kita ketahui bahwa sejak krisis, banyak perusahaan ataupun proyek-proyek yang tidak

dapat melunasi hutang-hutangnya. Dan untuk menghindari kebangkrutan dan pencabutan izin usahanya maka, ditempuh jalan tersebut. Akibatnya tidak ada penambahan modal dan tentunya tidak ada penambahan lapangan kerja. Lain halnya dengan investasi langsung, di mana akan ada proyek baru dan tentunya akan ada lapangan pekerjaan baru.

Investasi dan tabungan berfungsi untuk meningkatkan produksi, di mana dengan investasi industri-industri baru mulai meningkat dan hasilnya digunakan untuk pembangunan mengatasi persoalan bangsa yang lainnya.

Ada beberapa teori yang dikemukakan oleh para ahli dalam kaitannya dengan berbagai faktor yang mempengaruhi modal asing. Di antaranya adalah teori dari Alan M. Rugman; **Teori Penanaman Modal** :

“ The factors which determine the foreign investment are the environment variable and the internalization variable” . Alan M Rugman menyatakan bahwa ada dua faktor penting yang mempengaruhi penanaman modal (investasi) asing.⁷

Adapun faktor-faktor yang Mempengaruhi Investasi Asing adalah:

1. Variabel lingkungan, yang juga dikenal dengan istilah keunggulan spesifik negara atau faktor spesifikasi lokasi. Ada tiga unsur yang membangun variabel lingkungan yaitu: ekonomi, non ekonomi dan pemerintah.
2. Variabel internalisasi atau keunggulan spesifik perusahaan/penanam modal. Hal mana setiap penanam modal sebisa mungkin mewarnai

⁷ Alan M. Rugman , *International Bussines: Form and Environment*, (New York: Mc Graw Hill Book, 1985) hal 73

Afrika Tengah yang hingga saat ini terus mengalami pertumbuhan ekonomi yang rendah, bahkan stagnasi, karena kurangnya kegiatan investasi. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan dana atau dengan kata lain, *output* atau hasil hanya dapat dicapai apabila permintaan masyarakat meningkat. Dengan asumsi bahwa fungsi konsumsi dan fungsi tabungan stabil, maka pertumbuhan output hanya bisa terjadi jika investasi meningkat.

Dari hasil-hasil studi kuantitatif yang dilakukan di tahun 1990-an menemukan korelasi positif dan signifikan antara investasi dengan pertumbuhan ekonomi, di mana dikatakan bahwa, investasi bukan progres teknologi tetapi merupakan faktor utama di balik pertumbuhan yang cemerlang. Di mana investasi dapat menambah jumlah lapangan kerja dan oleh karena itu produksi meningkat.¹⁰

Adapun teori maupun konsep yang juga dapat digunakan adalah **“Konsep Kepentingan Nasional.”** Konsep ini adalah yang paling populer dalam analisa hubungan internasional, baik baik untuk mendeskripsikan, menjelaskan, meramalkan maupun menganjurkan perilaku internasional, juga sering dipakai sebagai dasar untuk menjelaskan perilaku luar negeri suatu negara dan sebagai pengukur keberhasilan suatu politik luar negeri, yaitu untuk evaluasi.¹¹

¹⁰ *Transformasi Ekonomi di Indonesia*, Loc. Cit., hal 42

¹¹ Mochtar Mas'ood, *Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi*, LP3ES, Jakarta, 1990, hal 139

Kepentingan nasional dalam hal ini diartikan sebagai kelangsungan hidup (*survive*) yang meliputi kemampuan untuk melindungi identitas fisik, mempertahankan rezim ekonomi politik dan memelihara identitas budayanya. Konsep kepentingan nasional dalam hal ini adalah dalam rangka pemulihan ekonomi nasional, dengan tujuan untuk meningkatkan hubungan serta kerjasama ekonomi dan perdagangan luar negeri dalam rangka memantapkan pemulihan ekonomi nasional. “Konsentrasi pembangunan ekonomi nasional Indonesia diarahkan pada upaya untuk memulihkan sendi-sendi perekonomian nasional, yang mengalami kemerosotan semenjak munculnya krisis keuangan dan moneter. Hubungan luar negeri harus diupayakan untuk meningkatkan arus investasi asing, di samping berbagai kerjasama ekonomi dan keuangan baik dengan negara-negara lain maupun dengan lembaga-lembaga keuangan internasional.”

Di mana strategi yang dijalankan antara lain adalah:

1. Meningkatkan kerjasama ekonomi dan perdagangan luar negeri terutama guna mendorong ekspor non migas.
2. Meningkatkan arus masuk non hutang melalui investasi asing ke Indonesia.
3. Meningkatkan kerjasama keuangan negara-negara donor dan lembaga-lembaga keuangan internasional.¹²

¹² Djumadi M Anwar , *Diktat Politik Luar Negeri Indonesia* , Yogyakarta, 2004, hal 65

Sedangkan menurut Jack C Plano dan Roy Oton, kepentingan nasional adalah faktor mendasar dan pokok yang menuntun para pembuat keputusan luar negeri suatu negara. Kepentingan nasional merupakan konsep yang masih umum dan khas dari berbagai elemen yang merupakan keinginan yang sangat vital. Yang termasuk dalam elemen tersebut adalah mempertahankan kemerdekaan, integrasi wilayah, keamanan militer, dan kesejahteraan ekonomi.¹³

Sementara itu dalam kaitannya dengan Teori Hubungan Luar Negeri seperti yang tertera dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri, yang menyatakan bahwa Hubungan Luar Negeri adalah setiap kegiatan yang menyangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan oleh Pemerintah di tingkat pusat dan daerah, atau lembaga-lembaganya, lembaga negara, badan usaha, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau warga negara Indonesia. Undang-Undang tersebut merupakan patokan normatif bagi pelaksanaan hubungan luar negeri, dalam hal ini adalah oleh Departemen Luar Negeri Indonesia (Deplu). Berdasarkan UU No. 37/1999 tentang Hubungan Luar Negeri tersebut, Deplu berfungsi sebagai koordinator dalam pengelolaan hubungan dan politik luar negeri, termasuk kaitannya tentang peran Deplu dalam promosi penanaman modal dari luar negeri ke Indonesia.

¹³ Jack C Plano & Roy Oton, *The International Relation Dictionary*, Ricment & Wiston, 1969, hal 128

Dalam UU Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri ditetapkan bahwa Departemen Luar Negeri menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintah dan pembangunan dalam bidang Hubungan Luar Negeri dan Politik Luar Negeri. Hal yang sama juga ditegaskan dalam Pasal 31 Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, bahwa Departemen Luar Negeri mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang politik dan hubungan luar negeri.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 31, dalam Pasal 32 Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005 ditetapkan bahwa Departemen Luar Negeri menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

- Perumusan kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan dan kebijakan teknis di bidang politik dan hubungan luar negeri;
- Pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya;
- Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya;
- Pengawasan atas pelaksanaan tugasnya;
- Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden.

Dalam menyelenggarakan fungsi tersebut, Departemen Luar Negeri mempunyai kewenangan:

- Penetapan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;

- Penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
- Penetapan persyaratan akreditasi lembaga pendidikan dan sertifikasi tenaga profesional/ahli serta persyaratan jabatan di bidangnya;
- Pengaturan penerapan perjanjian atau persetujuan internasional yang disahkan atas nama negara;
- Penetapan kebijakan sistem informasi nasional di bidangnya;

Kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

- (a) pengaturan dan pelaksanaan hubungan sosial, politik, ekonomi, budaya, dan penerangan luar negeri, serta;
- (b) pengaturan dan pelaksanaan protokol dan konsuler.¹⁴

Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa dalam melaksanakan perannya Deplu tidak boleh melenceng dari UU No 37/1999 bahwa Deplu berperan sebagai koordinator pelaksanaan hubungan luar negeri, termasuk dalam perannya di bidang penanaman modal asing di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan sebenarnya mengenai masalah investasi di Indonesia, termasuk promosi investasi, pemerintah Indonesia telah memiliki badan khusus yang menanganinya yaitu BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal), sehingga Deplu tidak bisa memiliki peran yang terlampau besar dalam penanaman modal asing di Indonesia termasuk juga dalam mempromosikannya.

¹⁴ http://www.deplu.go.id/?category_id=12&news_id=679&main_id=1

Selain sebagai koordinator bagi promosi investasi asing ke Indonesia, Deplu juga berperan sebagai informator yang memberikan informasi tentang potensi investasi di Indonesia kepada calon investor asing melalui perwakilannya di luar negeri.

F. Hipotesa

Berdasar permasalahan dan kerangka pemikiran di atas, maka dapat ditarik hipotesa bahwa, Peran Departemen Luar Negeri Indonesia Mempromosikan Penanaman Modal Asing di Indonesia adalah menyebarkan informasi tentang potensi investasi asing di Indonesia serta sebagai koordinator bagi calon investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

G. Jangkauan Penelitian

Penelitian ini di mulai sejak tahun 2003 sampai saat ini, di mana pada tahun 2003 dicanangkan pemerintah sebagai Tahun Investasi Indonesia. Sementara mengenai perwakilan-perwakilan KBRI di luar negeri, karena data yang bisa diperoleh, maka yang dapat dituliskan adalah perwakilan-perwakilan KBRI di negara Yunani, Kanada, Belgia, Finlandia, Jerman dan Jepang.

H. Teknik Penulisan

Penulisan ini bersifat studi kepustakaan (*library research*). Untuk itu penulis mengambil referensi berupa : Buku-buku literatur, bulletin, jurnal, surat kabar, majalah, *Web-Site* di Internet dan juga referensi-referensi lain yang relevan.

I. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan ini termuat dalam lima bab, dimana masing-masing bab akan berisi tentang hal-hal sebagai berikut:

- BAB I** : Merupakan pendahuluan yang berisi alasan pemilihan judul, tujuan penelitian, latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka dasar pemikiran, jangkauan penelitian, teknik penulisan, dan sistematika penulisan.
- BAB II** : Berisi gambaran umum tentang Investasi asing di Indonesia pada masa Orde Baru sampai terjadinya krisis 1997.
- BAB III** : Berisi tentang perkembangan Investasi asing di Indonesia setelah terjadinya krisis (periode 1998-2003).
- BAB IV** : Dalam bab ini akan dibahas tentang Peran Departemen Luar Negeri Indonesia Mempromosikan Penanaman Modal Asing ke Indonesia selama periode 2003-2005.
- BAB V** : Merupakan bab terakhir dan penutup skripsi ini yang memuat kesimpulan dari bab-bab sebelumnya.